

## Women's Rights Fought for in Women's Movement during the National Movement

### Hak-hak Perempuan yang Diperjuangkan Dalam Gerakan Perempuan Masa Pergerakan Nasional

Aprilia Triaristina<sup>a</sup>, Octari Tauvita<sup>b</sup>

<sup>a),b)</sup> Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Bandar Lampung, Indonesia

e-mail: [aprilialia@fkip.unila.ac.id](mailto:aprilialia@fkip.unila.ac.id), [tauvitaoctary@gmail.com](mailto:tauvitaoctary@gmail.com)

---

#### Abstract

*Women during the national movement have seen that in addition to being a mother, they have the right to contribute, have an opinion and develop themselves. Elite women and those who were able to receive education at that time moved to inspire and make changes for Indonesian women to get their rights and progress afterward. For this reason, this article will discuss the rights of women who were fought for and the beginning of the existence of the movement to fighting for women's rights. From there it can be seen whether the rights that we get today are a gift from the struggle of the women's movement at that time and how hard they fought to get these rights. Because rights are what we can get regardless of age, gender and so on. By using data collection in the form of literature study and historical literature with related titles, then analyzed and poured descriptively. So, it can be said that the rights that were obtained by men at that time, we must also be able to get them. Then we have to maintain the rights that we have got and even have to advance them, or we develop again the rights that have not been fulfilled for women.*

**Keyword:** Women's Movement, Rights, Struggle

#### Abstrak

*Perempuan masa pergerakan nasional sudah melihat bahwa di samping menjadi seorang ibu mereka mempunyai hak untuk berkontribusi, berpendapat dan mengembangkan dirinya. Para perempuan elit dan yang bisa mengenyam pendidikan masa itu, bergerak membangkitkan semangat dan membuat perubahan untuk perempuan Indonesia agar mendapat hak nya serta kemajuan setelahnya. Untuk itu pada artikel ini akan dibahas hak perempuan yang diperjuangkan serta awal mula dari adanya gerakan tersebut hingga memperjuangkan hak-hak perempuan. Dari situ dapat diketahui hak yang kita dapat dimasa sekarang apakah sebuah hadiah dari perjuangan pergerakan perempuan masa itu dan seberapa kerasnya mereka berjuang untuk mendapatkan hak tersebut. Sebab hak merupakan apa yang bisa kita dapatkan tanpa memandang umur, gender dan sebagainya. Dengan menggunakan pengumpulan data berupa studi pustaka dan literatur sejarah dengan judul yang terkait, lalu dianalisis dan dituangkan secara deskriptif. Maka dapat dikatakan bahwa hak-hak yang didapat laki-laki masa itu, pun kita juga harus bisa mendapatkannya. Lalu hak yang sudah kita dapatkan itu harus tetap kita pertahankan bahkan harus kita majukan, atau kita kembangkan lagi hak-hak yang sekiranya belum terpenuhi untuk perempuan.*

**Kata kunci:** Gerakan Perempuan, Hak-hak, Perjuangan

---

## 1. PENDAHULUAN

Semua manusia yang dilahirkan di dunia mempunyai hak yang sama dan harus mereka dapatkan dan terpenuhi, sebab adanya hak memberikan seseorang kebebasan dalam menjalankan sesuatu, dimana salah satu hak ini ada hak hidup. Maka jika manusia hidup tidak mempunyai hak tersebut, maka kebutuhan,

pendapat, kebebasan tidak akan ia dapatkan. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* (2002), hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan untuk manusia yang meliputi persamaan dan kebebasan, juga adanya hak untuk mempertahankan kehidupannya serta benda yang dimilikinya.

Hak yang diberikan Tuhan dan yang kita maknai sendiri tentu seharusnya tidak memandang umur, gender atau perbedaan umum lainnya yang dimiliki semua manusia. Seperti perempuan, kesetaraan gender dimasa sekarang mulai membaik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tentu masih banyak diskriminasi tentang perempuan di mata dunia, seperti pada dunia pekerjaan. Apalagi ketika masa penjajahan bangsa Barat maupun Asia, perempuan benar-benar hanya dijadikan sebagai “dapur-sumur-kasur”. Padahal perempuan butuh pendidikan sebagai pedoman dan pandangan hidup, memberikan kecerdasan dan kesadaran lebih. Adanya hak perempuan ditunjukkan agar martabat perempuan sama, setara dan terlindungi di mata hukum, bukan kehendak politik tertentu.

Secara alamiah bisa dikatakan bahwa setiap perempuan mempunyai hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak (Mulia, 2006). Dimana hak asasi perempuan bertujuan untuk menjamin martabat setiap perempuan (Watch, 2007). Maka dari itu, ini jugalah yang diperjuangkan wanita-wanita di masa lampau terkhusus masa pergerakan nasional yang banyak munculnya organisasi pergerakan perempuan untuk menaikkan martabat perempuan masa itu.

Pada umumnya yang memulai pergerakan adalah kaum perempuan dari kalangan atas (elite) yang pernah mengenyam pendidikan barat. Mereka memperjuangkan kemajuan yang berarti menghapus segala hambatan agar mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakat dan aspirasinya, seperti adanya pendidikan atau bekerja di luar rumah tangga. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa cara hidup yang seperti itu akan lebih befaedah serta lebih sesuai dengan cita-cita peri kemanusiaan dan keadilan selain menurut sistem feodal dan tradisional yang membentengi lingkungan hidup kaum perempuan (Suryochondro, 1984).

Di berbagai daerah mulai ada gerakan-gerakan perempuan tapi masih bersifat daerah, dan banyak dipelopori oleh perempuan-perempuan yang hebat juga yang berani menentang penjajahan masa Belanda seperti Cut Nya Dien dari Aceh, dan ada Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Yang ditandai dengan berdirinya organisasi wanita pertama yang bernama Puteri Mardhika pada 1912, sebagai perwujudan pencapaian pendidikan yang telah dirintis oleh R.A. Kartini (A.K. Pringgodigdo, 1992). Dari pelopor-pelopor wanita tersebut akhirnya banyak hak-hak perempuan yang akhirnya dapat di angkat dan dirasakan wanita Indonesia.

Maka dari itu dalam artikel ini akan dibahas secara rinci, hak apa saja yang diperjuangkan untuk perempuan Indonesia, tapi sebelum itu akan dibahas terlebih dahulu awal mula dari adanya gerakan tersebut hingga memperjuangkan hak-hak perempuan. Dari situ dapat diketahui hak yang kita dapat dimasa sekarang apakah sebuah hadiah dari perjuangan pergerakan perempuan masa itu dan seberapa kerasnya mereka berjuang untuk mendapatkan hak tersebut.

Bahkan pada 22-25 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang melibatkan banyak organisasi wanita lainnya. Dari hasil kongres tersebut adanya keinginan mendirikan studiefonds (Soewondo, 1984) murid perempuan yang pintar tetapi tidak mampu, melenyapkan perkawinan anak-anak dan memajukan kependuan untuk perempuan (Bambang Suwondo, 1977-1978). Bisa dilihat bahwa hak pendidikan perempuan masa itu digalakan, dan akan ada hak-hak lainnya yang senantiasa diperjuangkan perempuan-perempuan hebat masa itu, sehingga sekarang kita dengan mudah memperoleh nya, hanya butuh dorongan wanita-wanita lain di luar sana untuk mempertahankannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kualitatif, yakni penelitian menggunakan analisis yakni mengurangkain sesuatu objek yang akan ditelaah lalu digolongkan berdasarkan konteks nya yang akhirnya nanti akan menemukan pemahaman mengenai suatu objek atau masalah yang diteliti tersebut, baik berupa gambar, kata maupun kejadian. Peneliti mengungkapkan keadaan Spanyol pada masa Islam datang yang akhirnya menemukan penyelesaian dan pemahamannya. Menurut Basrowi dan Suwandi, bahwa penilitan kualitatif ialah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui hal statistic seperti grafik, tabel atau bentuk hitungan lainnya (Hendratno, 2011:12).

Pelaksanaan penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian atau penulisan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai atau suatu hal yang dapat diamati untuk kepentingan dan berkaitan dengan penulisan. Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisisnya kembali dan dituangkan dalam tulisan. Sumber data penulisan menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi dari sumber lain yang sifatnya mendukung seperti buku atau jurnal sejarah terdahulu.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Awal Mula Organisasi Pergerakan Perempuan di Indonesia**

Gerakan perempuan selalu menjadi hal yang harus digencarkan untuk wanita bisa memiliki kesetaraan dalam bidang apapun di dunia. Feminisme dapat diartikan yakni paham dalam perjuangan pergerakan perempuan yang ternyata mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di berbagai negara termasuk di Indonesia (Hanafi, 2015). Sekarang wanita di Indonesia berhak bersekolah, memiliki jabatan tinggi dan pekerjaan hebat lainnya yang biasanya diduduki oleh laki-laki. Tak serta merta mudah di dapatkan, masa penjajahan lah dimana perempuan-perempuan hebat memperjuangkan aspirasinya untuk wanita bisa memiliki hak-haknya.

Dulu semasa perjuangan pergerakan, wanita ditempatkan pada hak-hak yang lebih sempit dari laki-laki. Bahkan ada istilah “pingitan,” yang artinya seorang perempuan harus menetap di dalam rumah dan tidak melakukan apapun, dan tidak diizinkan orang tuanya untuk merasakan bangku pendidikan (Setiadi, 2011). Maka dari itu, pergerakan-pergerakan perempuan masa kolonial bertujuan memberantas kekungan yang diberikan masyarakat. Karena gerakan memperjuangkan hak perempuan merupakan gerakan yang bermacam-macam bentuknya disusul dengan berbagai teori dan pandangan politik yang berbeda-beda pula (McDonald, 2001).

Adanya pergerakan perempuan pertama kali dipelopori oleh R.A Kartini melalui gagasan idealismenya, yang mana memberikan kesadaran kepada wanita-wanita di Indonesia lainnya untuk mengangkat emansipasi wanita, dimana Kartini lebih memusatkan pada pendidikan. Kartini pernah ditawarkan untuk beasiswa di Belanda, tetapi akhirnya ia tolak karena waktu itu beranggapan bahwa wanita tidak bisa mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Namun Kartini mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk melanjutkan studinya di luar negeri menjadi lebih banyak pemuda yang diterima (Susanto Tirtoprodjo, 1961).

Akhirnya Kartini dengan ketiga saudaranya yaitu Roekmini, Kartinah, dan Soemantrie mendirikan perkumpulan atau organisasi perempuan pertama di Jakarta dengan nama “Poetri Mardika” pada 1912 (Suryochondro, Organisasi-organisasi Wanita di Indonesia, 1976). Menurut A.K. Pringgogidgo, tahun awal pergerakan Indonesia hanya mementingkan kedudukan sosial menjadi tinggi atau tidak. Permasalahan politik seperti hak pemilihan dan kemerdekaan tanah air belum menjadi tema pembicaraan. Paham tentang budi pekerti, keagamaan dan adat masih menjadi tantangan terbesar pergerakan masa itu untuk dapat melangkah maju (Ading Kusdiana, 19985).

Dalam perkembangan selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu mulai muncul organisasi-organisasi perempuan yang lain seperti, “Pawiyatan Wanito” yang berdiri di Magelang Jawa Tengah pada tahun 1915, “Wanito Hadi” di Jepara tahun 1915, “Purborini” di Tegal tahun 1917, “Wanito Susilo” di Pematang tahun 1918, “Darmo Laksmi” di Salatiga, “Karti Woro” dan “Budi Wanito” di Solo, “Wanito Kencono” di Banjarnegara, “Panti Krido Wanito” di Pekalongan, dan “Kesumo Rini” di Kudus. Selain itu, juga berdiri organisasi “Wanito Rukun Santoso” di Malang, “Putri Budi Sejati” di Surabaya tahun 1919, “Wanito Mulyo” di Yogyakarta tahun 1920, “Wanito Utomo” di Yogyakarta tahun 1921, “Wanita Taman Siswa” tahun 1922, “Aisyiyah” di Yogyakarta tahun 1917, “Wanita Katholik” di Yogyakarta tahun 1924, “Jong Islamiten Bond Dames Afdeeling” di Jakarta tahun 1925 (Kowani, 1978).

Dapat dilihat bahwa organisasi pertama yang dipelopori oleh Kartini membawa dampak positif untuk wanita-wanita Indonesia dan akhirnya sadar untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Pergerakan perempuan ini terus berlanjut pada gelombang kedua yakni pada 1960-1970. Karena kesiapan wanita Indonesia untuk terlibat dalam organisasi-organisasi tentang perempuan meningkat juga kecakapan berorganisasipun semakin bertambah berkembang. Selain itu, kesempatan belajar yang diberikan semakin meluas dan berkembang ke lapisan bawah (Ohorella, 1992). Akhirnya membuat Wanita-wanita di

Indonesia serentak maju untuk mencari hak nya. Juga masa itu dibarengi dengan feminisme yang berkembang di negara-negara Barat, dan akhirnya paham ini juga menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia dan khususnya pulau Jawa (Noer, 1980).

### **Hak-hak yang Diperjuangkan dalam Pergerakan Perempuan Indonesia** ***Pendidikan untuk Perempuan***

Organisasi perempuan pertama yang dipelopori oleh Kartini tersebut lebih berorientasi pada pendidikan. Karena masa itu para ibu banyak yang tidak memiliki pendidikan yang layak hanya diajarkan tentang menjadi istri atau ibu yang baik, maka diperjuangkan hak pendidikan karena seandainya seorang ibu mendidik anak-anaknya jika mereka juga mendapatnya pendidikan yang layak terlebih dahulu. Kartini mempunyai keinginan untuk mengadakan beasiswa terhadap anak yang tidak mampu untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Tapi baru dapat terealisasikan oleh dr. Wahidin Sudiro Husodo (Sartono Kartodirdjo, 1968).

Semasa pemerintahan kolonial, sekolah-sekolah yang didirikan untuk pribumi hanya berorientasi pada laki-laki saja dan diperuntukan pada kaum elite, karena menganggap wanita tidak boleh lebih pintar dari laki-laki dan pemikiran lainnya yang menyudutkan hak-hak wanita. Atau masa sebelum kolonial, adanya pondok pesantren yang hanya bisa di isi oleh murid laki-laki. Dan pembelajaran yang diberikan pun masih seputar agama, bukan pelajaran umum lain yang harusnya didapatkan untuk membantu dalam kehidupan sosial (Poespanegoro, 2010).

Adanya politik etis yang dipelopori oleh J. Th van Deventer khususnya di bidang edukasi, membawa pengaruh yang besar bagi pendidikan kaum perempuan. Direktur Pendidikan Hindia Belanda yaitu J.H Abendanon dan istrinya Rosa mendorong dibukanya kesempatan pendidikan untuk perempuan, namun ditolak oleh pihak Belanda. Oleh karena itu, Abendanon serta teman-temannya membuka sekolah yang dinamakan “Kartini” pada 1913. (Poespanegoro, 2010). Yang awalnya untuk wanita di Jawa akhirnya berkembang ke daerah lainnya seperti Jakarta (1913), Madiun (1914), Pekalongan (1917), Surabaya (1918) (Pringgodigdo, 1964). Dapat dilihat bahwa gagasan Kartini bisa merubah keadaan wanita saat itu dengan adanya pendidikan dan wanita bisa memenuhi salah satu hak nya yakni mengenyam pendidikan.

Memasuki 1910, makin banyak perempuan yang memasuki pendidikan Barat dan menjadi anggota elite modern dan tentu saja memiliki peran penting dalam memajukan dan meningkatkan semangat di antara perempuan untuk mulai bersekolah. Dan sekolah-sekolah yang dibuat masa Belanda saat itu, akhirnya memperbolehkan wanita masuk mengenyam pendidikan. Tahun 1909 anak gadis yang bersekolah di sekolah desa berjumlah 3.097, tahun 1914 menjadi 19.455 orang, dan terus meningkat pada 1919 yakni 36.649 (Blackburn, 2004).

Di daerah-daerah pun gencar memajukan pendidikan untuk kalangan wanita, seperti di Jawa Barat yang dipelopori oleh Dewi Sartika, Rohana Kudus dan Rahmah El Yunusiyah di Sumatera Barat, Maria Walanda Marimas di Sulawesi Utara. Lalu di Sulawesi Selatan ada Siti Aisyah We Tenriolle, yang memberikan pendidikan modern Ternater pada 1908 (Kowani, 1978).

Pada tahun 1920an, organisasi perempuan makin melebar dan akhirnya dibuatkan kongres perempuan pertama yang membahas mengenai pemerintah yang harus meningkatkan jumlah sekolah untuk anak gadis. Dan harus bersifat modern, yang berujuan mengembangkan bakat anak bukan hanya menjadi istri dan ibu dalam sekolah tradisional. Karena perempuan mempunyai kekuatan penting untuk memperkuat bangsa, karena perempuan sebagai pilar negara (Blackburn, 2004). Bisa dilihat bahwa hak pendidikan untuk wanita sudah di dapat melalui banyak perjuangan, dari yang organisasi bahkan individu.

### ***Perkawinan Anak-anak dan Poligami***

Adanya sekolah sebagai sarana pendidikan untuk perempuan Indonesia kala itu tidak hanya sebagai menambah kecerdasan dan pengetahuan, tetapi juga untuk membendung gadis-gadis dipaksa menikah pada usia dini. Jika perempuan mendapatkan pendidikan dan tau apa yang mereka inginkan, dan bisa memungkinkan menentukan jalan mereka sendiri, maka pernikahan dini dapat disingkirkan (Poespanegoro, 2010).

Di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota banyak sekali ditemuka pernikahan dini, seperti di Banten yang disebabkan oleh sekonomi agar keluarga yang gadis lepas dari beban dan mengharpkan

tenaga bantuan dari menantunya untuk menggarap sawah ladangnya. (Blackburn, 2004). Padahal perkawinan tersebut rentan terhadap perceraian bahkan kematian pada ibu yang melahirkan karena diangka yang masih belia. Pada kongres ke-3 Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI) diganti menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) yang bertugas meneruskan biro konsultasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun suatu rancangan undang-undang pernikahan bagi umat Islam (Lapian, 2011).

Akhirnya organisasi-organisasi perempuan di Indonesia tidak hanya berpusat pada pendidikan tetapi pada hak ini juga. Hal tersebut didukung oleh Sutomo agar menghilangkan perkawinan pada anak usia dini, dan mendesak pemerintah Belanda untuk menghapus praktik tersebut (Blackburn, 2004). Itulah sebab yang menyokong wanita untuk bergerak karena mengetahui tentang kedudukannya dalam perkawinan dan hidup keluarga (Suhartono, 1994). Dan sebab lainnya yakni poligami, dimana suami boleh mempunyai lebih dari satu istri. Tapi pada kasus di masa itu, yang poligami akan mensesarkan istri tua nya, dan permasalahan lainnya yang merugikan wanita. Dan seorang laki-laki bisa sewaktu-waktu menceraikan istrinya, tidak mengetahui sebab nya, dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah diceraikan (Pringgodigdo, 1964). Bisa dilihat bahwa hal tersebut ternyata sangat merugikan wanita, seolah wanita dianggap sebagai barang. Untuk itu hal tersebut juga menjadi sorotan dalam hak yang akan diperjuangkan. Sesudah perjuangan untuk memberantas hak tidak menikah muda dan dipoligami, hak-hak tersebut akhirnya terealisasi bahkan dibuatkan Lembaga untuk masalah perkawinan dan sebagainya pada 1928.

### ***Hak Berpolitik***

Muncul juga organisasi atau perkumpulan perempuan yang berhaluan politik dan ada juga yang tidak masuk ke dalam dunia politik (Leririza, 1989). Karena organisasi perempuan yang tergabung dalam kongres perempuan diperhitungkan dapat mencurahkan cita-cita organisasi, ideologi partai bahkan ajaran agama dan tidak meminta persyaratan yang tinggi untuk anggotanya (Muharam, 1996). Dari mengenyam pendidikan Barat dan mendapatkan pengetahuan baru tentang politik, maka banyak perempuan sadar akan pentingnya politik, salah satu yang diperjuangkan masa itu ialah Dewan Rakyat (Volksraad). Dimana masa itu perempuan-perempuan berusaha mendudukan Maria Ulfa untuk mencalonkan di Dewan Rakyat tetapi gagal. Tetapi seiring berjalannya waktu ada empat wanita yang mendapatkan kursi di dewan kota. Pada 29 September 1955 politisi perempuan bisa menjadi anggota perlemen dan memperoleh hak pilihnya secara penuh. (Darwin, 2004).

Pada tahun sebelumnya yakni 1937 dikeluarkan hak pilih pasif, artinya perempuan berhak diangkat dalam dewan perwakilan. Akan tetapi mereka belum mendapat hak pilih aktif, yaitu hak memilih wakil-wakilnya dalam dewan-dewan perwakilan. Baru pada 1938 ada empat orang yang diangkat sebagai dewan daerah, yaitu Emma Puradireja, Sri Umiati, Ny. Sunario, Ny. Siti Sundari (Blackburn, 2004). Karena pada 1939 bertepatan dengan Kongres Perempuan Indonesia ke-3 di Bandung yang membahas mengenai hak politik kaum wanita (Budi Sujati, 2020).

Keberadaan kaum perempuan memberitahukan bahwa wanita Indonesia tidak pasif, wanita Indonesia bisa melakukan apa yang seorang laki laki bisa lakukan tentu dengan beberapa pengecualian. Perempuan kala itu banyak yang menjadi pendorong semangat untuk para suaminya dan mengatakan agar senantiasa teguh di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tak jarang juga wanita Indonesia yang mendaratkan diri kedalam laskar-laskar kewanitaan dan terjun langsung dalam medan-medan pertempuran dan bersama-sama mempertahankan serta memperjuangkan Republik Indonesia (M.C. Ricklef, 1994).

## **4. KESIMPULAN**

Pergerakan organisasi perempuan bertujuan untuk meningkatkan martabat serta memperjuangkan hak-hak wanita. Karena setiap perempuan memiliki hak atas kebebasan, rasa aman, dan standar hidup yang layak. Masa dimana perempuan tidak setara dengan laki-laki, dan hanya menjadi istri dan ibu, serta perempuan tidak boleh terlibat dalam bidang apapun untuk menjalankan kehidupannya. Maka dari itu perempuan-perempuan masa kolonial, bergerak maju bersama untuk menyetarakan gender, dan hak

lainnya. Dipelopori oleh R.A Kartini yang memperjuangkan hak pendidikan untuk semua perempuan Indonesia, dan akhirnya dibuatlah sekolah “Kartini”, diikuti sekolah-sekolah di daerah lainnya seperti yang dibuat oleh Dewi Sartika. Selain pendidikan sebagai pengetahuan dan masa depan lebih baik, pendidikan masa itu dimaksudkan untuk meminimalisir adanya perkawinan dini para gadis. Karena pada saat itu, perkawinan dini dianggap wajar karena faktor ekonomi keluar si gadis. Hak selanjutnya yakni berpolitik, perempuan baru bisa menduduki dunia politik pada Kongres Perempuan Indonesia ke-3 dan ada beberapa wanita yang berhasil masuk dalam dewan daerah atau kota walaupun masih dalam hak pilih pasif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suwondo, d. (1977-1978). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Inggris: Cambridge University Press.
- Budi Sujati, I. H. (2020). Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 28.
- Darwin, M. (2004). Gerakan Perempuan di Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 286.
- Hanafi, H. Abid Al Jabiri, M. (Penj). Bukhory, U. (2015). Dialog Timur dan Barat. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hendratno, Djoni. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kartodirdjo, Sartono. 1968. “Peristiwa dan Tokoh dari Sejarah Pergerakan Nasional” dalam Lembaran Sejarah, No. 2, hlm. 58
- Kusdiana, Ading. 1998. “Lahirnya Hari Ibu” dalam Majalah Media Pembinaan, No. 9/XXV, Bulan Desember, hlm. 5-6.
- Kowani. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka .
- Lapian, A.B. (2011). *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Leiriza, R.Z. dkk. (1989). *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- McDonald, L. (2001). *Feminisme dan Sosialisme*. Australia: Resistance Book.
- Muharam, E. 1996. *Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Dalam Bidang Pendidikan Wanita Pribumi di Hindia Belanda 1900-1942*. Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Mulia, S. M. (2006). Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan. *Jurnal Perempuan*, 59.
- Noer, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Ohorella. (1992). *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta : Balai Pustaka .
- Poespanegoro, M. D. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan 5 Edisi Pemuktahiran .
- Pringgodigdo, M. A. (1964). *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakjat.
- Ricklef, M.C. 1994. *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiadi, E. (2011). *Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana
- Soewondo, N. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia-Indonesia.
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Suryochondro, S. (1976). *Organisasi-organisasi Wanita di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Suryochondro, S. (1984). *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Yayasan Ilmu-Ilmu sosial, 76.
- Tirtoprodjo, Susanto. 1961. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta : PT Pembangunan Watch, K. K. (2007). *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. 62.